

**KINERJA DAN PROSPEK KETAHANAN PANGAN KOMODITAS BERAS
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh : Siti Husnul Hotimah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran beras di Kabupaten Jember, untuk menganalisis ketahanan pangan pada beras di Kabupaten Jember tahun 2009 – 2013, untuk menganalisis kontribusi komoditas beras terhadap total komoditas tanaman pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Sebagai makhluk bernyawa, tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya untuk berkembang biak dan bermasyarakat. Untuk menilai keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan mengukur tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Jember.

Untuk menjawab permasalahan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran beras di Kabupaten Jember, bagaimanakah ketahanan pangan pada beras di Kabupaten Jember tahun 2009 – 2013, bagaimanakah kontribusi komoditas beras terhadap total komoditas tanaman pangan, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, Least Square Method dan kontribusi komoditas.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah beras yang diminta pada tahun $t-1$ (Qd_{t-1}), variabel harga beras pada tahun $t-1$ (P_{t-1}), variabel pendapatan per kapita penduduk pada tahun t (I_t) dan variabel jumlah penduduk pada tahun t (Pop_t) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel jumlah beras yang diminta pada tahun t (Qd_t); variabel jumlah beras yang ditawarkan pada tahun $t-1$ (Qst_{t-1}), harga beras pada tahun $t-1$ (P_{t-1}) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel jumlah beras yang ditawarkan pada tahun t (Qst_t); tren perkembangan produksi beras di Kabupaten Jember yang diperoleh pada tahun 2004 – 2013 mengalami peningkatan; tahun 2003 hingga 2008 kontribusi beras mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah produksi tanaman pangan selain beras, yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan.

Kata kunci: Kinerja, Ketahanan Pangan, Komoditas Beras

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Sebagai makhluk bernyawa, tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya untuk berkembang biak dan bermasyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tergolong tinggi dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal yang perlu diwaspadai dari pertumbuhan jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya permintaan bahan pangan baik dalam jumlah, mutu dan keragaman. Peningkatan permintaan bahan pangan yang bermutu dan beragam sangat terkait dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya (Suryana, 2003).

Dengan laju penduduk yang tergolong tinggi dan dengan jumlah penduduk yang besar (sekitar 210 juta jiwa pada tahun 2000), Indonesia menghadapi tantangan

yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya tersebut pemerintah melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan butir-butir kebijakan umum yang sekaligus merupakan acuan dalam menentukan langkah-langkah pembangunan sektor pertanian. Salah satunya adalah mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan, pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang (Anonimus, 2001).

Bersamaan dengan hal tersebut, saat ini dunia juga dilanda krisis pangan yang terutama menjadi lebih nyata sejak Januari 2008. Sama halnya dengan harga minyak yang akhir-akhir ini terus meninggi, krisis pangan juga diperkirakan

menandakan telah lewatnya masa harga pangan yang rendah yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa yang lalu. Dilain pihak, berbeda dengan krisis minyak yang memang telah diketahui akan secara cepat atau lambat muncul mengingat telah tuanya sumur-sumur minyak dunia dan tidak ditemukannya ladang-ladang minyak baru, krisis pangan datangnya hampir secara tak terduga. Kenaikan harga pangan ini telah mengancam kesejahteraan dunia dan bahwa krisis pangan ini akan mementahkan hasil-hasil yang selama ini telah dicapai oleh usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dunia.

Bappenas menyatakan bahwa masalah pangan tersulut oleh terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran beras dunia terkait dengan program pengembangan *bio-fuel*. Penyulut (*trigger*) ini terjadi pada saat telah berlangsungnya beberapa sebab lain seperti pemanasan global yang telah menyebabkan kekeringan dan gagal panen gandum di Australia, dan beralihnya para petani di Australia dari menanam beras, yang banyak

membutuhkan air, ke menanam anggur yang melalui teknik "*dripping*" menggunakan air jauh lebih sedikit. Khusus pada triwulan pertama 2008 beberapa negara produsen beras yang secara tradisional surplus dan menjadi pengeksport beras dunia telah memutuskan untuk menghentikan atau paling tidak membatasi penjualan beras mereka ke pasar dunia. Situasi yang semakin ketat antara permintaan dan penawaran beras dunia ini kemudian diperparah lagi oleh adanya aksi spekulasi beras baik di negara produsen yang surplus (seperti Thailand dan Vietnam) maupun di negara-negara yang biasanya menjadi negara pengimpor beras.

Solusi krisis pangan (menurut ulasan majalah *Economist* terbitan 19 April 2008) terletak pada upaya menghilangkan distorsi pasar yang menyebabkan kesenjangan antara penawaran pangan/beras dan permintaannya tidak dapat menemukan keseimbangannya. Dalam pasar yang relatif tidak terdistorsi setiap kenaikan harga pangan/beras akan ditanggapi oleh

para petani dengan meningkatkan produksinya sehingga harga akan kembali menurun. Ketika harga pangan/beras naik mereka tidak cenderung untuk menaikkan produksinya. Beberapa sebab struktural dari kurang/tidak tanggapnya para petani kecil ini adalah : *pertama*, berkurangnya lahan pertanian karena proses konversi lahan pertanian untuk penggunaan industri; *kedua*, telah menurunnya komitmen pemerintah negara negara berkembang pada peningkatan alokasi pembangunan untuk pertanian, khususnya untuk penelitian dan pengembangan teknologi pangan (antara tahun 1980 dan 2004 alokasi dana pembangunan pemerintah untuk pertanian telah menurun sebesar 50%), padahal upaya peningkatan bibit baru harus berlangsung secara terus menerus mengingat suatu bibit baru harus dapat terus menyesuaikan mengingat adanya jenis hama dan penyakit tananam yang terus berkembang; *ketiga*, pemilikan lahan pertanian oleh petani cenderung menurun dari rata-rata 1,5 hektar pada tahun 1990 menjadi rata-rata

0,5 hektar per petani. Hal ini telah menyebabkan biaya produksi per hektar cenderung tinggi sehingga petani tidak mempunyai cukup insentif untuk menaikkan produksi walaupun harga pangan meningkat; *keempat*, mekanisme pasar akan berjalan baik kalau semua pelaku mempunyai informasi lengkap yang sama tentang situasi permintaan dan penawaran.

Menurut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XI Jember pesimistis dapat memenuhi target pengadaan beras di Kabupaten Jember, Jatim sebanyak 80.000 ton, selama tahun 2009. Kepala Bulog Divre XI Jember, Khairil Anwar, Senin, 30 Maret 2009 menyatakan bahwa realisasi pengadaan beras tahun ini mengalami penurunan, karena harga gabah dan beras di pasaran melebihi harga pembelian pemerintah (HPP). Khairil menambahkan bahwa banyak petani yang menjual gabahnya ke pasar dan perusahaan penggilingan, tidak ke Bulog, karena Bulog membeli gabah petani sesuai dengan HPP yakni dua ribu empat ratus rupiah per-kilogram untuk gabah

kering sawah (GKS).. Hingga hari ini realisasi pengadaan beras di Bulog sebanyak 36.000 ton, sedangkan kebutuhan pangan selama satu tahun di Jember mencapai 52.000 ton, termasuk beras untuk masyarakat miskin (raskin). Selanjutnya Khairil Anwar menjelaskan bahwa hasil pemantauan tim Bulog di 21 kecamatan di Kabupaten Jember, harga gabah kering giling (GKG) sebesar Rp3.050,00 hingga Rp3.100,00/kg, sedangkan harga gabah kering sawah (GKS) sebesar Rp2.440,00 hingga Rp2.450,00. Khairil Anwar menyatakan bahwa meski harga gabah dan beras di atas HPP, harganya masih nisbi wajar, karena kenaikannya tidak mencapai 20 persen dari HPP," katanya menerangkan. Oleh karena itu tercapai atau tidak target pengadaan beras di Bulog Divre XI Jember tergantung pada produksi panen para petani di Jember. "Perum Bulog berharap, produksi panen petani melimpah dan harga gabah nisbi stabil, sehingga stok pangan di Jember tercukupi," katanya berharap.

Untuk menilai keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dapat

dilakukan dengan mengukur tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi berkaitan dengan kinerja pangan di Kabupaten Jember sekaligus memberi gambaran ketahanan pangan komoditas beras untuk tahun 2009 - 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketahanan Pangan

Pangan merupakan istilah yang teramat penting bagi pertanian karena secara hierarkhi pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam pemenuhan aspirasi humanistic. Ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua rumah tangga baik secara fisik maupun ekonomi mampu mencukupi kabutuhan pangan seluruh

anggota keluarganya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Partohardjono dan Makmur (1989) bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda, sehingga usaha untuk pemenuhan pangan merupakan prioritas utama bagi semua negara. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar bangsa Indonesia. Permintaan akan beras meningkat dari waktu ke waktu dengan makin bertambahnya jumlah penduduk. Pemenuhan kebutuhan pangan, produksi beras harus selalu ditingkatkan.

Berdasarkan pendapat Partohardjono dan Makmur (1989) dapat dipahami bahwa keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di suatu negara harus tercerminkan oleh kemampuan negara tersebut dalam swasembada pangan, atau paling tidak ketahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan

sosial, tetapi masalah ini mengandung konsekwensi politik yang sangat besar. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap kelangsungan suatu kabinet pemerintah atau stabilitas politik di dalam negeri apabila Indonesia terancam kekurangan pangan atau kelaparan. Bahkan di banyak negara, ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang (calon) presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Ketahanan pangan bertambah penting lagi terutama karena saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Artinya, di satu pihak, pemerintah harus memperhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, namun, di pihak lain, Indonesia tidak bisa menghambat impor pangan dari luar. Dalam kata lain, apabila Indonesia tidak siap, keanggotaan Indonesia di dalam WTO bisa membuat Indonesia menjadi sangat

tergantung pada impor pangan, dan ini dapat mengancam ketahanan pangan di dalam negeri.

Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 17 yang menyebutkan bahwa "Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Sementara pada *World Food Summit* tahun 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan

hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (Pambudy, 2002).

Konsep ketahanan pangan nasional yang tercantum pada UU No.17 tersebut memberi penekanan pada akses setiap RT terhadap pangan yang cukup, bermutu, dan harganya terjangkau, meskipun kata-kata RT belum berarti menjamin setiap individu di dalam RT mendapat akses yang sama terhadap pangan karena di dalam RT ada relasi kuasa (Pambudy, 2002). Implikasi kebijakan dari konsep ini adalah bahwa pemerintah, di satu pihak, berkewajiban menjamin kecukupan pangan dalam arti jumlah dengan mutu yang baik serta stabilitas harga, dan, di pihak lain, peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya dari golongan berpendapatan rendah.

Istilah ketahanan pangan (*food security*) sebagai sebuah konsep kebijakan baru pertama kali muncul pada tahun 1974, yakni ketika dilaksanakannya

konferensi pangan dunia (Sage, 2002). Maxwell mencoba menelusuri perubahan-perubahan definisi tentang ketahanan pangan sejak konferensi pangan dunia 1974 hingga pertengahan dekade 90an; perubahan terjadi pada level global, nasional, skala rumah tangga dan individu; dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) hingga pada perspektif penghidupan (*livelihood perspective*) dan dari indikator-indikator objektif ke persepsi yang subjektif. (Maxwell, 1996).

FAO menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah "situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman (safe) dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. World Bank juga mengidentifikasi bahwa Ketahanan pangan adalah: "akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Sedikitnya ada empat element ketahanan pangan

berkelanjutan (*sustainable food security*) di level keluarga yang diusulkan oleh Maxwell (1996), yakni: pertama, kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Kedua, akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (*entitlements*) untuk memproduksi, membeli atau menukarkan (*exchange*) pangan ataupun menerima sebagai pemberian (*transfer*). Ketiga ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, resiko dan jaminan pengaman sosial. Keempat: fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi dan/atau siklus.

Wibowo (2000) mendukung pendapat diatas yaitu dengan mengemukakan bahwa system ketahanan pangan dikatakan mantap apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat pasti memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat,

tumbuh dan sportif. Tiga indikator kunci selalu diupayakan untuk memenuhi masalah ketahanan pangan ini, yaitu (1) ketersediaan pangan (*food availability*); (2) jangkauan pangan (*food access*); (3) kehandalan (*reliability*) dari ketersediaan maupun jangkauan pangan.

2.1.2 Komoditas Beras

Beras merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras, berfungsi sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Beras adalah bahan makanan yang merupakan sumber pemberi energi. Beras mengandung nilai gizi yang tinggi, selain itu gizi yang dikandung oleh beras adalah sangat mudah dicerna oleh tubuh. Susunan gizi yang membuktikan keunggulan beras sebagai pemberi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan makanan lainnya (Siregar, 1981).

Tanaman beras menurut Istiyastuti dan Yanuharso (1996) merupakan tanaman yang cocok dibudidayakan di daerah pantai

dengan ketinggian mencapai 2400 meter di atas permukaan laut, mulai dari posisi 53⁰ LU sampai dengan 35⁰ - 40⁰ LS. Beras sebagai tanaman semiaquatis ditanam dilahan tergenang, tetapi ada juga yang dapat ditanam dilahan kering atau ladang.

Usaha meningkatkan produksi pangan menurut Suparyono dan Setyono (1997) selalu mendapat perhatian yang serius sedangkan teknologi yang digunakan selalu mengalami perkembangan, terutama bagi petani beras guna meningkatkan atau memenuhi kebutuhan pangan. Teknologi yang dianjurkan dalam budidaya tanaman beras meliputi : penentuan pola tanam tahunan, pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, pergiliran varietas, jarak tanam, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk pelengkap, pengendalian jasad pengganggu, pengairan dan pasca panen.

2.1.3 Beras Sebagai Ketahanan Pangan

Penyamaan swasembada beras dengan ketahanan pangan sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Ini semacam mitos yang terus direproduksi ulang dari

masa ke masa. Ketersediaan beras di gudang Bulog kerap di jadikan basis ketahanan pangan di level propinsi maupun kabupaten. Hal ini mengidikasikan pengutamaan beras sebagai indikator ekonomi nasional.

Dominasi beras atas sumber daya pangan lainnya di Indonesia dapat ditemukan dalam istilah-istilah lokal seperti “palawija” (Sansekerta, phaladwija) yang harfiahnya berarti sesuatu yang bukan beras (sekunder) atau pangan kelas dua, sesuatu yang terkonstruksikan secara budaya (*culturally constructed*). Beras telah menjadi sumber pangan dominan yang tercermin dari 50% total konsumsi nasional (Van der Eng 2000). Rata-rata, sekitar 96% penduduk Indonesia makan beras ketimbang sumber pangan lainnya (Simatupang, 1999).

Lambang beras digunakan sebagai simbol kemakmuran negara. Di daerah-daerah produsen jagung dan umbi jalar seperti Timor dan Papua, beras tetap disimbolkan sebagai

lambang pemerintahan daerah. Dari penelusuran di Internet terhadap lambang-lambang pemerintah kabupaten, hampir tidak ada propinsi yang tidak memasukan beras sebagai lambang daerah. Tingginya ketergantungan pada beras di daerah seperti Timor, Maluku, Papua, dan Kalimantan telah terjadi sejak jaman kolonial memberlakukan perdagangan antar pulau di Nusantara.

2.1.4 Produksi Beras di Indonesia dan di Kabupaten Jember

Walaupun sejak mencapai swasembada beras pada tahun 1984 masih terjadi tahun-tahun defisit produksi beras dibandingkan dengan kebutuhan dalam negerinya produksi beras Indonesia telah terus meningkat (Tabel 2.1). Kinerja dibidang beras ini terlihat dari peningkatan produksi beras dari 51,1 juta ton pada tahun 1996 yang mencapai puncaknya pada tahun 2007 menjadi 57,0 juta ton. Dengan rendemen beras menjadi beras

sebesar 65% pada tahun 1996 dan 63% pada tahun 2007 hasil ini menjadi 33,2 juta ton beras dan 35,9 juta ton beras pada masing-masing tahun tersebut. Peningkatan ini juga tercermin pada kenaikan luas panen dari 11,6 juta Ha menjadi 12,2 juta Ha, dan pada kenaikan produktivitas dari 4,4 juta ton per hektar menjadi 4,69 juta ton per hektar pada masing-masing tahun 1996 dan 2007. Berkat kinerja produksi beras yang baik pada tahun 2007 ini maka krisis pangan/beras yang melanda dunia pada awal tahun 2008 tidak mempengaruhi stabilitas ketersediaan beras dan tingkat inflasi Indonesia. Bahkan mulai bergulir gagasan untuk mengekspor beras.

Produktivitas beras di Kabupaten Jember mengalami fluktuatif produksi beras dari 3,799 ton/hektar pada tahun 1996 dengan luas panen 123.612; 3,583 ton/hektar pada tahun 1997 dengan luas panen 127.236; 3,023 ton/hektar pada tahun 1998 dengan luas panen 150.766; 3,229

ton/hektar pada tahun 1999 dengan luas panen 154.085; 3,416 ton/hektar pada tahun 2000 dengan luas panen 148.021; 3.163 ton/hektar pada tahun 2001 dengan luas panen 143.233; 3,392 ton/hektar pada tahun 2002 dengan luas panen 141.880; 3,384 ton/hektar pada tahun 2003 dengan luas panen 131.522; 3,374 ton/hektar pada tahun 2004 dengan luas panen 135.031; 3,289 ton/hektar pada tahun 2005 dengan luas panen 141.804; 3,378 ton/hektar pada tahun 2006 dengan luas panen 140.184; 3,467 ton/hektar pada tahun 2007 dengan luas panen 140.184; 3,467 ton/hektar pada tahun 2007 dengan luas panen 141.066; 3,583 ton/hektar pada tahun 2008 dengan luas panen 143.597.

2.1.5 Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia

Kebijakan harga beras telah menjadi basis kebijakan pangan dan beras lebih dari 300 tahun, sejak masa kolonial (Mears, 2009). Sayangnya, *nature* dari kebijakan harga pangan hari

ini sangat berbeda dengan asal-muasalnya. Pemerintah Kolonial Belanda selalu menginginkan harga buruh yang murah bagi investasi pertaniannya di Nusantara. Karena itu, harga dasar pangan dan beras selalu ditekan rendah, karena harga beras sangat penting bagi konsumsi keluarga, sehingga perlu membuat harga dasar pangan utama tersebut rendah sepanjang waktu (Mears, 2009).

Presiden Sukarno menjiplak kebijakan yang sama dengan motivasi dukungan politik. Sukarno ingin memproteksikan kekuasaannya dengan cara mengambil hati pegawai negeri sipil dan militer dengan cara proteksi pendapatan melalui beras sebagai komponen gaji bulanan (Mears, 2009). Tujuannya yakni rezim yang belia memerlukan kesetiaan dan dukungan politik.

Masa pemerintahan Suharto regime selama 32 tahun secara telak menjiplak hal yang sama. Bisa dibayangkan dukungan beras untuk memberi makan 4.6 juta PNS dan 0.5 juta militer akan

berdampak pada hasil voting dalam pemilu. Kondisi menjadi lebih buruk ketika beras dibaptis menjadi barometer ekonomi pembangunan tapi pada saat yang sama berfungsi sebagai alat politik.

Kelahiran Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun 1967 (Lihat tabel 2.2), sejak awal diproyeksikan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme: stabilisasi harga beras dan pengadaan bulanan untuk PNS dan militer. Bulog berfungsi sebagai pengontrol harga beras dengan cara mematok harga beras domestic secara signifikan lebih tinggi dari harga beras dunia. Hal ini masih menjadi kebijakan Megawati hingga tahun 2004 (Timmer 2004).

Kondisi ini diperparah lagi dengan korupsi di tubuh BULOG (Timmer 2004). Simatupang (1999) menuduh kebijakan pangan Indonesia sebagai praktek *kleptocracy*, yang berarti bahwa rezim Suharto menggunakan Bulog sebagai mesin uang bagi

kepentingan pribadi dan keuntungan politis. Akhir 1980, Bulog tetap ditugasi untuk memerankan kontrol pasar perberasan Indonesia tetapi sedikit diperluas untuk menangani komoditas pangan lain seperti gula pasir, gandum, jagung, kedelai dan sejumlah komoditas lainnya. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Indonesia bergumul dengan upaya mencapai swasembada pangan sejak 1952 hingga hari ini. Pencapaian swasembada pangan 1984 tidak mampu dijaga secara berkelanjutan. Yang perlu dicatat adalah upaya mencapai swasembada pangan tidak disertai oleh upaya penguatan ketahanan pangan.

Susilo Bambang Yudoyono (SBY) gencar mempromosikan “revitalisasi pertanian”, dengan upaya mencapai swasembada beras maupun non-beras. Melalui pengarus-utamaan pangan alternatif seperti jagung, singkong, di samping beras. Karena itu, di atas kertas, ada peningkatan kualitas kebijakan

dibandingkan rezim kepresidenan sebelumnya. Revitalisasi pertanian termasuk di dalamnya juga pembangunan sektor agribisnis demi terciptanya nilai tambah komoditas agribisnis demi pendapatan dan akses atas pangan yang lebih baik.

2.1.6 Kontribusi Komoditas Beras Terhadap Perekonomian Kabupaten Jember

Kontribusi adalah sumbangan atau peranan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator kontribusi ini dipergunakan untuk menganalisis sektor mana yang paling besar menyumbang atau berperan terhadap PDB. Kontribusi sektor terhadap PDB dihitung terutama sebagai indikator perubahan struktur ekonomi Indonesia (Kadariah, 1990).

Indikator yang paling lazim digunakan untuk mengukur dan membandingkan skala perekonomian suatu negara adalah PDB, yaitu nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian dan dijual di pasar selama periode tertentu. Tingkat kemakmuran rata-

rata penduduknya diukur dengan PDB perkapita. Indikator serupa dapat pula diterapkan untuk ditingkat pemerintah yang lebih rendah ini disebut produk domestik regional bruto (PDRB) (Messi, 1998).

Kontribusi yang diberikan sektor pertanian cukup besar sehingga menjadikan pertanian sebagai sektor yang tangguh dan kuat serta menjadi sektor pemimpin dalam kegiatan pembangunan nasional. Sektor pertanian menjadi sektor pemimpin dalam kegiatan pembangunan nasional atau regional karena kemampuan sektor pertanian yang tidak perlu diragukan yang tercermin dalam indikator agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur penampilan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah hasil penjualan unit bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam batas-batas tertentu suatu wilayah yang biasanya dalam satu tahun. Ada dua versi penilaian PDRB, yaitu:

a. Atas dasar harga berlaku, apabila semua barang dan jasa yang dimiliki dinilai berdasar pada harga pasar pada tahun

bersangkutan. Penetapan atas dasar harga berlaku ini bisa digunakan untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu wilayah.

b. Atas dasar harga tetap, apabila semua produksi barang dan jasa dinilai dengan harga tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar. Penetapan ini bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang lebih mencerminkan pertumbuhan riil dari tahun ke tahun.

Perhitungan produk domestik regional bruto dengan menggunakan pendekatan produksi (*production approach*) yaitu bahwa produk domestik bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun, yang dihitung dengan harga pasar. Perhitungan besarnya produk domestik regional bruto seluruh lapangan usaha yang dibagi menjadi 9 sektor usaha/ekonomi, yaitu: pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran,

pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan persewaan bangunan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa (BPS, 2008).

Beras di Kabupaten Jember diusahakan oleh sebagian besar petani untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (*subsistem*), dan baru akan dikomersilkan apabila memenuhi kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi, sehingga pengusaha tanaman beras di Kabupaten Jember tidak terpusat di suatu daerah saja melainkan menyebar keseluruh wilayah Kabupaten Jember. Tingginya produksi serta luas areal komoditas beras dibandingkan dengan komoditas pangan yang lain menunjukkan bahwa beras mempunyai prospek pengembangan produksi dimasa mendatang. Hal ini didukung dengan data yang ditunjukkan oleh BPS yaitu produktivitas komoditas beras meningkat pada tahun 2008. (tabel 2.4). Tabel 2.4 menunjukkan bahwa berdasarkan luas areal, produktivitas, serta produksi tanaman pangan Kabupaten Jember tahun 2008,

komoditas beras mempunyai produksi yang lebih tinggi dibanding komoditas tanaman pangan lainnya.

Ketahanan pangan didasari oleh pendekatan ketersediaan pangan, dengan demikian ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai bagi semua penduduk untuk dapat hidup sehat dan aktif. Sehubungan dengan hal tersebut maka bidang-bidang pertanian , pangan terutama komoditas beras sebagai penghasil beras mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung tersedianya aneka ragam pangan yang bermutu, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Jember akan menjadi lebih kokoh. Kebutuhan beras untuk produksi beras di Kabupaten Jember akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta tingkat pendapatan perkapita. Salah satu indikator kunci selalu diupayakan untuk dipenuhi untuk masalah ketahanan pangan ini yaitu ketersediaan pangan.

2.1.7 Permintaan Barang

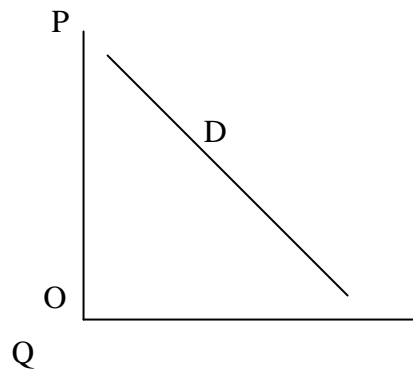
Dalam ilmu ekonomi, permintaan akan suatu jenis barang ialah jumlah barang yang dibeli pada berbagai tingkat harga di pasar pada jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, permintaan yang dimaksudkan disini adalah permintaan yang berdaya beli, artinya permintaan yang disertai dengan sejumlah uang untuk membeli barang yang bersangkutan (Poli, 1992). Hal ini dipertegas oleh Gilarso (1994) yaitu mendefinisikan permintaan (*demand*) sebagai jumlah barang yang mau dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan harga, dalam jangka waktu tertentu dan dengan anggapan hal-hal lain tetap (*ceteris paribus*).

Permintaan komoditas pertanian adalah banyaknya komoditas pertanian yang dibutuhkan dan dibeli oleh konsumen. Besar kecilnya permintaan komoditas pertanian umumnya dipengaruhi oleh harga, harga substitusi atau komplemennya, selera dan keinginan, jumlah konsumen dan pendapatan konsumen yang bersangkutan. Menurut Bilas

(1992) secara sederhana, hukum permintaan dapat dirumuskan bila keadaan lain tetap bersifat konstan, maka kuantitas atau jumlah barang yang akan dibeli per unit waktu (dalam suatu rentang waktu tertentu) akan menjadi semakin besar apabila harga semakin rendah.

Menurut Sukirno (1997) kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan sifat keterkaitan antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang yang dimintya konsumen. Kurva permintaan pada gambar 2.1 menunjukkan hubungan fungsional antara harga (P) dengan jumlah barang yang diminta (Q). Sukirno (1997) juga menyatakan bahwa pada umumnya kurva permintaan berbagai jenis barang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang bersifat demikian disebabkan oleh sifat keterkaitan diantara harga dan jumlah barang yang diminta, yaitu mempunyai hubungan yang terbalik. Kalau yang satu naik (misal harga), maka yang lainnya turun (misal jumlah barang yang diminta). Artinya banyak sedikitnya jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sesuai

dengan “Hukum Permintaan”. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta (dibeli) dapat digambarkan dalam bentuk grafis pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kurva permintaan

Keterangan : P = Harga
: Q = Jumlah permintaan
: D = Kurva permintaan

Kurva permintaan adalah tempat menyebarnya titik-titik yang menggambarkan tingkat pembelian maksimum yang dilakukan oleh para konsumen pada tingkat harga tertentu dalam kondisi dimana semua faktor lain bersifat *ceteris paribus* atau tidak berubah.

Permintaan pasar terhadap beras pada periode tertentu dipengaruhi oleh faktor selera, jumlah penduduk, dan lain-lain. Menurut Jatileksoko, Erwidodo dan Ariani dalam Hariyati (2003) bahwa

pengaruh pendapatan, jumlah penduduk dan harga barang lain pengganti (jagung, ubi kayu) dengan arah positif cukup signifikan terhadap permintaan konsumsi beras, sedangkan pengaruh harga beras kurang signifikan. Dengan demikian fungsi permintaan konsumsi beras dituliskan sebagai berikut:

$$Qd_t = a_1 Qd_{t-1} + a_2 P_{t-1} + a_3 I_t + a_4 Pop_t + c$$

Keterangan :

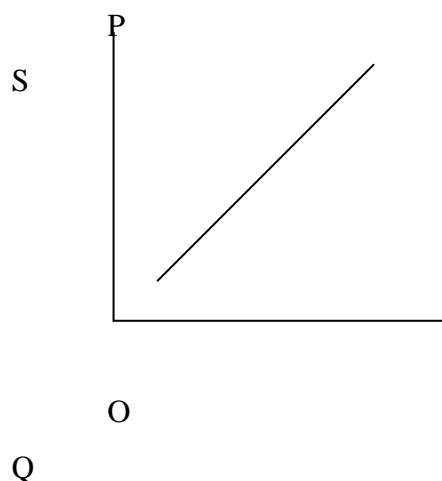
Qd_t = jumlah beras yang diminta pada tahun t
 Qd_{t-1} = jumlah beras yang diminta pada tahun t -1
 P_{t-1} = harga beras pada tahun t -1
 I_t = pendapatan per kapita penduduk pada tahun t
 Pop_t = jumlah penduduk pada tahun t
a = parameter estimasi

2.1.8 Penawaran Barang

Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga jual suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan pasar. Demikian pula sebaliknya apabila harga jual barang menurun maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dengan asumsi *ceteris paribus* yang berarti semua faktor selain harga

yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan dianggap tidak berubah. Hal ini dipertegas oleh pendapat Soekartawi (2003) bahwa penawaran pada hakekatnya merupakan jumlah keseluruhan komoditas pertanian yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga suatu pasar dan waktu tertentu. Melihat pengertian tersebut, terjadinya fluktuasi harga merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap produk pertanian. Sukirno (1997) lebih lanjut mengatakan bahwa kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan keterkaitan antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang yang ditawarkan di pasar, dengan asumsi semua harga barang lainnya tetap. Hal ini dapat disajikan pada

Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kurva penawaran

Keterangan :

P = harga

Q = jumlah penawaran

S = Kurva penawaran

(Boediono,1997)

Kurva penawaran pada gambar 2.2 menunjukkan hubungan fungsional antara harga (P) dengan jumlah barang yang ditawarkan (Q). Kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas yang berarti semakin tinggi harga barang tersebut, maka semakin besar pula jumlah barang yang ditawarkan. Namun sebaliknya, apabila harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Perjalanan searah ini dapat dikatakan bahwa kurva penawaran mempunyai *slope* atau kemiringan positif. Faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi kurva penawaran adalah:

- 1) Perubahan teknologi. Adanya perbaikan teknologi akan menyebabkan proses produksi menjadi lebih efisien.
- 2) Perubahan dari harga sumber daya yang relevan. Adanya penurunan harga sumberdaya

akan menyebabkan ongkos produksi menurun.

- 3) Perubahan dari harga barang alternatif yang mempergunakan sumberdaya yang sama. (Boediono,1997).

Penawaran beras merupakan hasil interaksi beberapa macam variabel antara lain produksi beras, harga gabah, harga pupuk urea sehingga dapat dirumuskan suatu fungsi sebagai berikut:

$$Q_{st} = b_1 Q_{st-1} + b_2 P_{t-1} + k$$

Keterangan :

Q_{st} = jumlah beras yang ditawarkan pada tahun t

Q_{st-1} = jumlah beras yang ditawarkan pada tahun t-1

P_{t-1} = harga beras pada tahun t

b = parameter estimasi

k = konstanta regresi tahap pertama

Dari fungsi penawaran tersebut dapat disusun suatu persamaan penawaran yang merupakan persamaan simultan karena

variabel independennya juga merupakan variabel dependen.

Ketersediaan pangan merupakan jumlah pangan yang ditawarkan produsen (diproduksi) ke pasar selama satu tahun. Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan yang dikonsumsi/dibeli konsumen selama setahun. Ketersediaan beras merupakan jumlah beras yang ditawarkan produsen ke pasar selama satu tahun. Konsumsi beras merupakan jumlah beras yang dikonsumsi/dibeli konsumen selama setahun.

METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjawab masalah pertama yaitu menganalisis tingkat permintaan dan penawaran beras di Kabupaten Jember untuk beberapa tahun mendatang dengan mengacu pada asumsi keseimbangan sistem

Cobweb, model fungsi permintaan beras pada tahun t didefinisikan sebagai fungsi dari permintaan beras tahun $t-1$, harga beras pada tahun t , pendapatan perkapita pada tahun t , dan jumlah penduduk pada tahun t .

$$Qd_t = a_1 Qd_{t-1} + a_2 P_{t-1} + a_3 I_t + a_4 Pop_t + c$$

Dimana:

Qd_t = jumlah beras yang diminta pada tahun t (kw)

Qd_{t-1} = jumlah beras yang diminta pada tahun $t-1$ (kw)

P_{t-1} = harga beras pada tahun $t-1$ (Rp/kg)

I_t = pendapatan per kapita penduduk pada tahun t (ribu Rp)

Pop_t = jumlah penduduk pada tahun t (jiwa)

a = parameter estimasi

c = konstanta regresi tahap pertama

Sementara itu fungsi penawaran didefinisikan sebagai fungsi dari penawaran beras tahun $t-1$, harga beras pada tahun $t-1$, yang secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$Qs_t = b_1 Qs_{t-1} + b_2 P_{t-1} + L_t + k$$

Dimana:

Qs_t = jumlah beras yang ditawarkan pada tahun t

Qs_{t-1} = jumlah beras yang ditawarkan pada tahun $t-1$

P_{t-1} = harga beras pada tahun t

L_t = luas tanah pada t

b = parameter estimasi

k = konstanta regresi tahap pertama

- b. Untuk menganalisis masalah kedua yaitu mengenai ketahanan pangan dari aspek ketersediaan beras di Kabupaten Jember tahun 2009 – 2013 dihitung dengan menggunakan trend linear dengan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*).
- c. Untuk menganalisis masalah ketiga yaitu kontribusi komoditas beras terhadap total komoditas tanaman pangan, menggunakan rumus sebagai berikut: (Hadi, 1999)

$$Z = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

Z = Kontribusi komoditas beras terhadap PDRB sub sektor tanaman pangan (%)

A = PDRB komoditas beras (Rp)

B = PDRB total komoditas tanaman pangan pokok (Rp)

Pengambilan keputusan:

Kontribusi rendah =

Z < dari rata-rata kontribusi PDRB tanaman pangan Kabupaten Jember;

Kontribusi tinggi =

Z > dari rata rata kontribusi PDRB tanaman pangan Kabupaten Jember

PEMBAHASAN

Harga beras tidak menimbulkan gangguan stabilitas pasar, penawaran dan penawaran dan permintaan beras relative stabil. Secara umum hasil empiris pendugaan model respon areal, produktivitas, produksi, maupun konsumsi komoditas padi (beras) relatif cukup baik. Hasil dugaan

parameter untuk masing-masing model respon dalam penelitian ini merupakan yang paling sesuai setelah dicoba berbagai persamaan ekonometrika dari masing-masing model tersebut. Dengan demikian pembahasan selanjutnya merupakan hasil yang optimal yang dapat disajikan dalam tulisan ini.

Pengaruh Variabel-Variabel Penelitian terhadap Permintaan

- 1) Jumlah beras yang diminta pada tahun $t-1$ ($Q_{d,t-1}$) sebesar 0,357, tanda positif menunjukkan bahwa variabel jumlah beras yang diminta pada tahun $t-1$ ($Q_{d,t-1}$) dan jumlah beras yang diminta pada tahun t ($Q_{d,t}$) mempunyai sifat hubungan yang searah ($t=1,199$; $\rho = 0,135$) artinya setiap peningkatan jumlah beras yang diminta pada $t-1$ belum tentu meningkatkan permintaan beras pada tahun t , dengan asumsi variabel-variabel yang lain yaitu P_{t-1} , I_t , Pop_t dianggap tetap.

Namun dengan demikian, karena koefisiennya tidak signifikan, maka pengaruh tersebut tidak bermakna. Masyarakat diperkotaan berubah perilaku konsumsinya dari terbiasa makan di rumah menyukai makan di luar rumah dengan membeli makanan jadi. Kecenderungan ini sebagai dampak bermunculannya industri makanan olahan seperti rumah makan atau restoran yang tersedia dimana-mana yang memberikan unsur kenyamanan, keindahan, dan mampu membangkitkan selera konsumen. Bentuk dan jenis pilihan makanan olahan berkembang sangat pesat, apalagi sejak krisis ekonomi bermunculan warteg-warteg atau cafe yang menyajikan berbagai jenis masakan dengan harga yang relatif terjangkau. Terdapat pula dampak dari penyerapan tenaga kerja termasuk wanita yang dituntut untuk makan

diluar rumah dan dengan keterbatasan waktunya, wanita yang bekerja cenderung membeli makanan jadi bagi anggota keluarganya. Kedua kondisi tersebut berdampak pada peningkatan konsumsi makanan/minuman jadi dan konsumsi makanan semakin beragam. Beberapa kondisi tersebut diduga berdampak pada penurunan pangsa pengeluaran padi-padian.

- 2). Harga beras pada tahun $t - 1$ (P_{t-1}) sebesar 1199,227, tanda positif dan signifikan ($t=2,075$; $\rho = 0,038$) yang menunjukkan bahwa variabel harga beras pada tahun $t - 1$ berpengaruh signifikan terhadap jumlah beras yang diminta pada tahun t . Setiap peningkatan harga beras yang diminta pada t_1 akan meningkatkan permintaan beras pada tahun t . Adanya pengaruh antara harga beras terhadap permintaan jumlah beras disebabkan karena beragamnya pangan yang

dikonsumsi oleh rumah tangga dan mungkin juga disebabkan semakin tingginya konsumsi makanan, sehingga harga beras mempengaruhi permintaan terhadap beras.

- 3). Pendapatan per kapita penduduk pada tahun t (I_t) sebesar 314,719, tanda positif menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita penduduk pada tahun t dan jumlah beras yang diminta pada tahun t mempunyai sifat hubungan yang searah ($t=0,991$; $\rho = 0,175$) artinya setiap peningkatan pendapatan perkapita yang diminta pada t belum tentu akan meningkatkan permintaan beras pada tahun t , dengan asumsi variabel-variabel yang lain tidak berubah. Namun dengan demikian, karena koefisiennya tidak signifikan, maka pengaruh tersebut tidak bermakna. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, masyarakat akan dihadapkan

pada banyak pilihan makanan yang sesuai selera tanpa kendala keuangan. Preferensi dan selera seseorang akan mengalami perubahan dari pilihan makanan yang sederhana dengan harga murah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti hanya terfokus pada pangan sumber karbohidrat berubah ke makanan yang juga sumber protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lebih lengkap jenis dan jumlahnya. Selain itu, juga mulai terjadi perubahan dalam aspek psikologis seseorang, dalam bentuk ingin mencoba makanan lain yang lebih mempunyai unsur "kegengsian" yang merupakan salah satu cara untuk memenuhi perubahan gaya hidup yang lebih mapan dan moderan. Sehingga muncul istilah bahwa perubahan gaya hidup (*life style*) akan merubah gaya makan (*its style*). Pangsa

energi dari padi-padian akan mengalami penurunan akibat peningkatan pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan akan semakin rendah permintaan akan beras.

- 4). Jumlah penduduk pada tahun t (Pop_t) sebesar 20,117, tanda negatif dan signifikan ($t=1,563$; $\rho = 0,081$) yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk pada tahun t berpengaruh terhadap jumlah beras yang diminta pada tahun t mempunyai sifat hubungan tidak searah, artinya setiap peningkatan jumlah penduduk yang diminta pada $t-1$ akan meningkatkan permintaan beras pada tahun t .

Pengaruh Variabel-Variabel Penelitian terhadap Penawaran

- 1). Jumlah beras yang ditawarkan pada tahun $t-1$ (Q_{st-1}) sebesar -0,025, tanda negatif menunjukkan bahwa variabel jumlah beras yang ditawarkan pada tahun $t-1$ (Q_{st-1}) dan jumlah beras yang ditawarkan

pada tahun t (Q_{st}) mempunyai sifat hubungan yang tidak searah ($t=0,079$; $\rho = 0,469$), artinya setiap peningkatan jumlah beras yang diminta pada $t-1$ akan menurunkan permintaan pada tahun t dengan asumsi variabel P_{t-1} dan L_t tetap. Namun dengan demikian, karena koefisiennya tidak signifikan, pengaruh tersebut tidak bermakna.

- 2). Harga beras pada tahun $t-1$ (P_{t-1}) sebesar 81,957, tanda positif menunjukkan bahwa variabel harga beras pada tahun $t-1$ dan jumlah beras yang ditawarkan pada tahun t mempunyai sifat hubungan yang searah ($t=1,186$; $\rho = 0,135$), artinya setiap peningkatan harga beras yang diminta pada $t-1$ akan meningkatkan permintaan pada tahun t sebesar 81,957 ton, dengan asumsi variabel Q_{st-1} dan L_t tetap. Namun dengan demikian, karena koefisiennya tidak signifikan, pengaruh tersebut tidak nyata.

3). Luas lahan pada tahun t (L_t) sebesar 9,153, tanda positif menunjukkan bahwa variabel harga beras pada tahun $t-1$ dan jumlah beras yang ditawarkan pada tahun t mempunyai sifat hubungan yang searah ($t=0,984$; $\rho = 0,177$) artinya setiap peningkatan luas lahan yang diminta pada $t-1$ akan meningkatkan permintaan pada tahun t dengan asumsi variabel Q_{st-1} dan P_{t-1} tetap. Namun dengan demikian, karena koefisiennya tidak signifikan, pengaruh tersebut tidak ada.

Model respon areal dan produktivitas padi sangat baik menerangkan kondisi faktual yang ada, terlihat dari $R^2 > 0,78$. Dengan kata lain, mampu secara bersama-sama menerangkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Secara umum, hasil dugaan parameter dari pada model konsumsi secara empiris, juga cukup baik menjelaskan kondisi faktual. Dari tanda dan

magnitude parameter dugaan pun tampaknya sesuai dengan harapan sehingga penghitungan elastisitas dan proyeksi dapat memberikan hasil yang cukup rasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan penelitian ini adalah:

- a. Variabel harga beras pada tahun $t-1$ (P_{t-1}) berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan beras dan variabel jumlah penduduk pada tahun t (Pop_t) berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel jumlah beras yang diminta pada tahun t (Q_{dt}) sedangkan jumlah beras yang diambil pada $t-1$ (Q_{dt-1}) dan pendapatan penduduk perkapita pada tahun t tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan beras.

Jumlah beras yang ditawarkan pada tahun $t-1$ (Q_{st-1}), harga beras pada tahun $t-1$ (P_{t-1}) tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel jumlah beras yang ditawarkan pada tahun t (Q_{st}).

- b. Tren perkembangan produksi beras di Kabupaten Jember yang diperoleh pada tahun 2004 – 2013 mengalami peningkatan.
- c. Tahun 2003 hingga 2008 kontribusi beras mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah produksi tanaman pangan selain beras, yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah pada kasus permintaan beras maka sudah sepatutnya pertambahan jumlah penduduk harus dapat diatasi. Jumlah penduduk adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan beras. Apabila jumlah penduduk dapat ditekan maka laju permintaan beras juga dapat ditekan pula, diharapkan di masa

mendatang pemerintah tidak terlalu dibebani untuk memenuhi permintaan beras.

Diharapkan penelitian ini akan berlanjut untuk meneliti tentang faktor bahan pangan selain beras sampai dengan meneliti pergeseran pola konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alderman C.H. and Timmer, C. P. 1980. *Food Policy and Food Demand in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economics Studies (BIES), Vol. 16, No. 3*, pp 83-93.
- Alsa, Asmadi. 2003, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Anonimus. 2001. *Program Pembangunan Pertanian 2001 – 2004*, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Ariani, M. 2004. Kebijakan Proteksi dan Promosi Komoditas Beras di Asia dan Prospek

- Pengembangannya di Indonesia. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Bilas, R. A. 1992. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono. 1997. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Husodo, Siswono Yudo (2002), "Membangun Kemandirian di Bidang Pangan untuk Memperkuat Ketahanan Nasional", makalah, Rapimnas Kadin Indonesia, 27-28 Februari, Jakarta.
- Istiyastuti dan T. Yanuharso. 1996. *Budidaya Aneka Tanaman Pangan*. Trigeda Karya. Bandung.
- Kadariah. 1990. *Ekonomi Perencana*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Maxwell, S. 1996. *Food security: a post-modern perspective*. Food Policy, Vol. 21. No. 2, pp 155-170.
- and Frankenberger, T. 1992. *Household food security concepts, indicators, and measurements*. New York, NY, USA: UNICEF and IFAD.
- Mears, L. 2009. *Problems of Supply and Marketing of Food in Indonesia in Repelita III*, BIES Vol. XIV No. 3 pp 52-62.
- Nuryanti. 2005. *Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia*. *Jurnal Agro Ekonomi*. Volume 23 No.1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Halaman 13
- Partohardjono, S. dan A. Makmur. 1989. *Peningkatan produksi padi gogo*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
- Poli, C. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pramasari, 2007. *Kinrja dan Prospek Ketahanan Pangan di Indonesia*. Sumenep.
- Rahardja dan Manurung. 2000. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Sage, C. 2002. *Food security and Environment*. In Page & Redclift, ed.
- Santosa, Dwi Andreas (2008a), "Krisis Pangan 2008", Kompas, Opini, 15 Maret: 6.
- Santosa, Dwi Andreas (2008b), "Krisis Pangan. Kebangkitan Petani", Kompas, Teropong. Opini, Jumat, 13 Juni: 59.
- Sicat, G. P. 1991. *Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Simatupang, P. 1999. *Toward Sustainable Food Security: The Need for A New Paradigm. ACIAR Indonesia Research Project, Working Paper 99.15.* 33 pp.
- Sukirno, S. 1997. *Pengantar Teori Mikroekonomi.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparyono, Dr & Agus Setyono, Dr. 1994. Padi. Penebar Swadaya. Jakarta
- Soetrisno, N. 1994. Ketahanan Pangan Dunia: Konsep, Pengukuran dan Faktor Dominan. *Majalah Pangan* No.21, Vol. IV Puslitbang Bulog. Jakarta.
- Suyadi, Adrianus. 2008. "Krisis Pangan dan Solidaritas", *Kompas*, Opini, Sabtu, 14 Juni.
- Timmer C. P (2004) Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook. Centre for Global Development, Working Paper Number 48.
- Tomek, W.G. and K.L. Robinson. 1990, *Agricultural Product Pric.*, Third Edition, Cornell University Press, Ithaca.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. "Masalah Ketahanan Pangan", *Kompas*, Opini, Rabu, 16 Januari.
- Van der Eng, P. 2000. Food for Growth: Trends in Indonesia's Food Supply, 1880-1995. *Journal of Interdisciplinary History*, XXX: 4. pp. 591-616.
- Deptan, 2008. *Biaya Produksi Naik*", *Bisnis & Keuangan*. Selasa, 27 Mei 2008.
- WorldBank.[online](<http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/countries/indonesia/shapesize.htm>).